



Rencana Strategis  
Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan  
Tahun 2020--2024

**Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi**

Jalan Sultan Alauddin, Km 7, Talasalapang,  
Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar  
Kode Pos 90221, Telepon (0411) 882401  
Faksimile (0411) 882403

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur ke hadirat Allah Swt., atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga penyempurnaan dan penyelarasan Rencana Strategis (Renstra) Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020—2024 dapat diselesaikan. Revisi Renstra berpedoman pada Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020—2024.

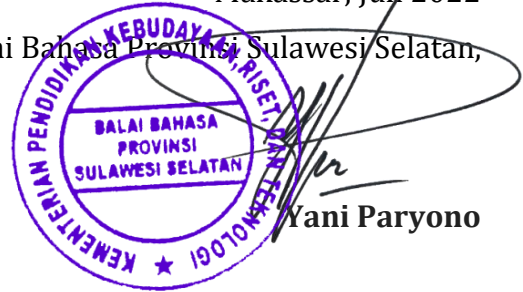
Selain itu, revisi renstra ini juga berisi telaah evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama tujuh tahun (2015—2021), agar adaptif terhadap perubahan situasi, kondisi dan kebijakan sesuai dengan tuntutan organisasi, serta dengan melakukan inovasi strategi pelaksanaan program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan mengacu pada tiga program prioritas yang diusung oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu Penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, Pelindungan bahasa dan sastra daerah, serta Internasionalisasi bahasa Indonesia. Strategi pelaksanaan kegiatan dengan pendekatan Kelompok Kepakaran dan Layanan Profesional (KKLP) terus diperkuat agar program dan kegiatan pada sisa tahun Renstra (2022—2024) dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

Renstra Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020—2024 akan menjadi acuan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan agar fungsi pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat dapat berhasil sesuai

target guna mendukung pembangunan nasional di bidang pendidikan dan kebudayaan.

Makassar, Juli 2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan,



Yani Paryono

## DAFTAR ISI

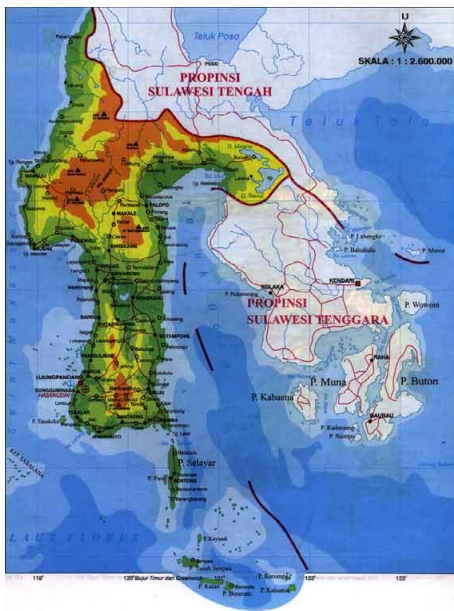
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI .....	iii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
1.1 Kondisi Umum .....	4
1.2 Permasalahan dan Potensi.....	13
BAB II TUJUAN DAN SASARAN.....	18
2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tahunan .....	19
2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran.....	20
BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN .....	23
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi.....	23
3.2 Kerangka Regulasi.....	28
3.3 Kerangka Kelembagaan .....	29
3.4 Reformasi Birokrasi.....	31
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	35
4.1 Target Kinerja .....	35
4.1.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020—2021 .....	35
4.1.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022—2024 .....	36
4.2. Kerangka Pendanaan .....	37
BAB V PENUTUP.....	40
LAMPIRAN .....	42

## BAB I

### PENDAHULUAN

**S**ulawesi Selatan sebagai salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di Indonesia bagian selatan pulau Sulawesi dengan ibu kotanya diduduki oleh Kota Makassar yang dahulu bernama Ujung Pandang. Sulawesi Selatan adalah sebuah pulau yang posisinya berada di selatan Sulawesi. Provinsi Sulawesi Selatan terletak di  $0^{\circ}12'$  -  $8^{\circ}$  Lintang Selatan dan  $116^{\circ}48'$  -  $122^{\circ}36'$  Bujur Timur. Luas wilayahnya  $46.717,48 \text{ km}^2$ . Provinsi ini berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di timur, Selat Makassar di barat dan Laut Flores di selatan.

Sulawesi Selatan sendiri memiliki zona waktu yang termasuk dalam WITA (Waktu Indonesia Bagian Tengah) dengan jumlah kabupaten 24



kabupaten. Provinsi Sulawesi Selatan terbentuk dan disahkan pada tanggal 13 Desember 1960 yang didasari oleh UU No. 47 Tahun 1960. Empat tahun setelahnya, pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan melalui UU No. 26 Tahun 2004. Pada tanggal 22 September 2004, berdasarkan UU nomor 26 Tahun 2004 Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mamasa yang semula merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan

secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Barat.

Berdasarkan SP2020, Jumlah Penduduk Provinsi Sulawesi Selatan pada September 2020 sebanyak 9,07 juta jiwa. Dengan luas daratan Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 46,72 ribu km<sup>2</sup>, maka kepadatan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 194 jiwa per km<sup>2</sup> yang tersebar di 24 Kabupaten/Kota yaitu 21 kabupaten dan 3 kotamadya, 304 kecamatan dan 2.953 desa/kelurahan. Selama 2010-2020, rata-rata laju pertumbuhan penduduk Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 1,18 persen. Jumlah penduduk tertinggi tercatat di Kota Makassar sebanyak 1.423.877 orang, sedangkan Jumlah penduduk terendah tercatat di Kabupaten Kepulauan Selayar sebanyak 137.071 orang. Sulawesi Barat yang merupakan provinsi hasil pemekaran dari provinsi Sulawesi Selatan memiliki luas wilayah sekitar 16,796.19 km<sup>2</sup>. Suku-suku yang ada di provinsi ini terdiri dari Suku Mandar (49,15%), Toraja (13,95%), Bugis (10,79%), Jawa (5,38%), Makassar (1,59%) dan suku lainnya (19,15%).

Provinsi Sulawesi Selatan yang diberi julukan “negeri para pemberani” menyimpan banyak potensi sumber daya alamnya, seperti pertanian, perkebunan, kelautan dan lainnya yang tercatat sebagai penyumbang terbesar bagi produksi nasional bahkan dikenal dunia karena diekspor ke berbagai negara. Potensi kekayaan alam Sulawesi Selatan tersebut membawa daerah ini menapaki tangga peradaban dunia. Calon investor pun mengalir deras melirik potensi di Sulsel.

Kekayaan potensi sumber daya alam menumbuhkan keanekaragaman budaya sesuai dengan situasi lingkungan alamnya. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa beragamnya kosakata bahasa daerah yang menggambarkan kondisi itu, belum termasuk aneka kosakata yang mendeskripsikan berbagai hasil olahan produk setempat yang khas dan unik. Tidak mudah untuk memahami budaya secara serta-merta. Salah satu cara untuk memahami budaya dapat dilakukan melalui bahasa. Bahasa memiliki salah satu fungsi sebagai penyimpan tata nilai budaya termasuk etika dan

moral yang tersimpan dalam berbagai bentuk kebahasaan, antara lain dalam kosakata, pantun, cerita rakyat, sejarah setempat, mitos, legenda, tradisi lisan, dan ungkapan. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan penjaga budaya; apabila sebuah bahasa punah, pada umumnya budayanya pun akan ikut punah.

Secara umum Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat didominasi oleh empat suku mayor yakni Bugis, Makassar, Toraja, dan Mandar, serta beberapa suku minor lainnya. Berbagai macam etnis dan suku bangsa yang mendiami wilayah Sulawesi Selatan dan Sulawesi barat menyebabkan wilayah tersebut kaya akan bahasa daerah. Sehingga wajar jika hampir setiap daerah memiliki bahasa daerah tersendiri. Jumlah bahasa daerah di Sulawesi Selatan sebanyak 14 bahasa daerah dan di Sulawesi Barat sebanyak 9 bahasa daerah.

Sehubungan dengan hal itu, keanekaragaman bahasa daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat harus dikembangkan dan dilindungi karena merupakan kekayaan budaya bangsa, bahkan kekayaan budaya seluruh umat manusia di dunia. Kewajiban negara untuk menghormati dan memelihara bahasa daerah dapat diwujudkan dalam bentuk perlindungan terhadap kebinekaan bangsa Indonesia dalam kehidupan bernegara. Hal ini merupakan amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 32, yang secara gamblang menyatakan bahwa (1) negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya dan (2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Dengan adanya klausul yang menyatakan bahwa negara menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budaya tersebut, semua bahasa daerah yang berada di Indonesia adalah kekayaan budaya nasional yang perlu dilindungi.

Dokumen Renstra Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ini merupakan rencana Pembangunan Jangka Menengah berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Revisi Renstra ini disusun melalui berbagai proses yang berlandaskan pada kebijakan, capaian kerja, hingga hasil analisis kondisi internal dan eksternal. Penyusunan Renstra bertujuan untuk mendukung perwujudan visi Kemendikbudristek, yaitu “Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Ber-karakter dengan Berlandaskan Gotong Royong”. Revisi renstra ini juga telah mengakomodasi tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dan Permendikbudristek Nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa dan Kantor Bahasa.

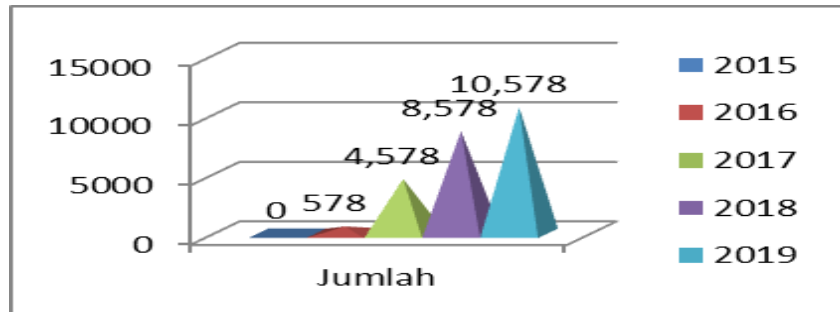
## **1.1 Kondisi Umum**

### **a. Capaian Tahun 2015—2019**

Sesuai perjanjian Kinerja Tahun 2019, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan tujuh sasaran strategis dengan dua belas indikator kinerja kegiatan yang ingin dicapai. Berikut tingkat ketercapaian tujuh sasaran strategis Balai Bahasa selama tahun 2019.

### SK1 Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

- Meningkatnya kosakata bahasa Indonesia dapat diukur dengan meningkatnya jumlah kosakata yang diperoleh. Sampai dengan tahun 2019 jumlah kosakata yang telah dihasilkan sebanyak 10.578 . Kosakata ini mengalami peningkatan setiap tahunnya dari 2015—2019 (akhir tahun renstra). Diharapkan dengan capaian ini dapat menambah jumlah kosakata bahasa Indonesia yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).



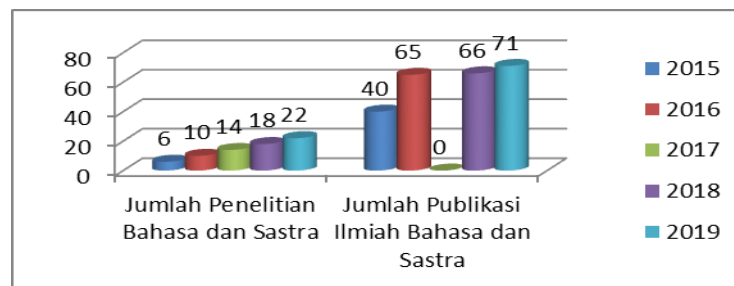
### SK2 Meningkatnya Bahasa dan Sastra yang Terlindungi

- Bahasa dan sastra yang terlindungi setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik dilihat dari tren capaian tiap tahunnya dari kurun waktu 2015—2019 (akhir renstra). Sasaran Strategis Bahasa dan Sastra yang Terlindungi di dukung oleh satu indikator kinerja kegiatan jumlah bahasa dan sastra yang terpetakan, terkonservasi dan terevitalisasi. Ketercapaian target yang melebihi dari target yang telah ditentukan, karena adanya efisiensi anggaran dengan memaksilmalkan anggaran yang ada sehingga mampu menghasilkan keluaran yang melebihi target yang telah di perjanjikan.



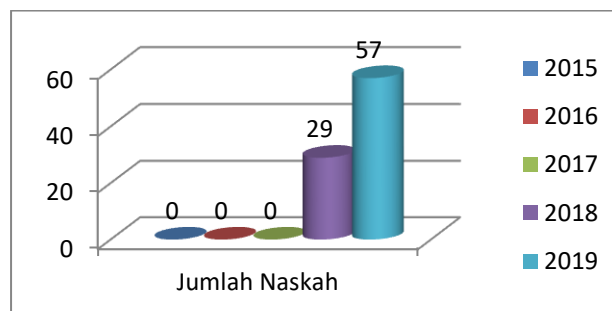
### SK3 Meningkatnya Jumlah dan Mutu Penelitian Bahasa dan Sastra

•Capaian target pada Sasaran Strategis ini Sampai dengan tahun 2019 yang merupakan akhir tahun renstra di dukung oleh dua indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah Penelitian Bahasa dan Sastra dan Jumlah Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra. Tren capaian pada tahun 2017 sampai tahun 2019 yang merupakan target akhir renstra mengalami kenaikan yang cukup baik, jumlah penelitian bahasa dan sastra hingga akhir tahun 2019 tercapai sebanyak 71 penelitian bahasa dan sastra dan jumlah publikasi ilmiah bahasa dan sastra tercapai sebanyak 22 publikasi. Pada tahun sebelumnya dari 2015—2018 capaian kinerja juga mencapai 100% atau sesuai dengan target yang di kontrak kinerjakan kecuali pada tahun 2017.



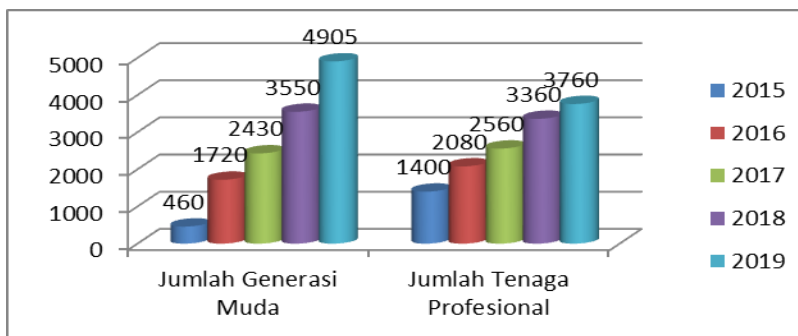
### SK4 Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan dan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia

•Capaian kinerja pada sasaran strategis ini menunjukkan capaian yang cukup baik di dua tahun terakhir yakni tahun 2018--2019. Pada tahun 2018 capain kinerja sebesar 100 % atau sebanyak 28 naskah yang sudah dihasilkan dari target 28 naskah yang sudah dikontrak kinerjakan. Tahun akhir renstra yaitu tahun 2019, capain sesuai pada indikoator kinerja kegiatan ini sebesar 100% atau 28 bahan dan modul pembelajaran bahasa dan sastra, hingga akhir tahun renstra Indikator Kinerja Kegiatan telah tercapai sebanyak 57 bahan dan modul pembelajaran bahasa dan sastra. Kegiatan pada Sasaran Strategis ini dukung satu indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah Bahan dan Modul Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada tahun 2015—2017 belum ada hasil yang diperoleh karena kegiatan ini tidak diprogramkan.



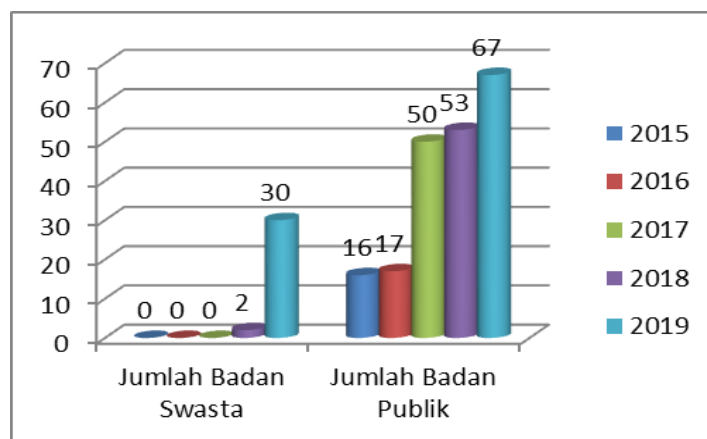
### SK6 Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra

• Pada Sasaran Strategis enam, capaian realisasinya diukur oleh dua indikator kinerja yaitu “Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra” dan “Jumlah Generasi Muda Pengapresiasi. Dari tren capaian dapat dilihat bahwa setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup baik. Pada tahun 2015—2018 target kinerja yang dikontrak kerjanya tercapai sebesar 100% sesuai dengan target. Capaian kinerja hingga akhir tahun renstra sebanyak 4.905 generasi muda pengapresiasi bahasa dan sastra.



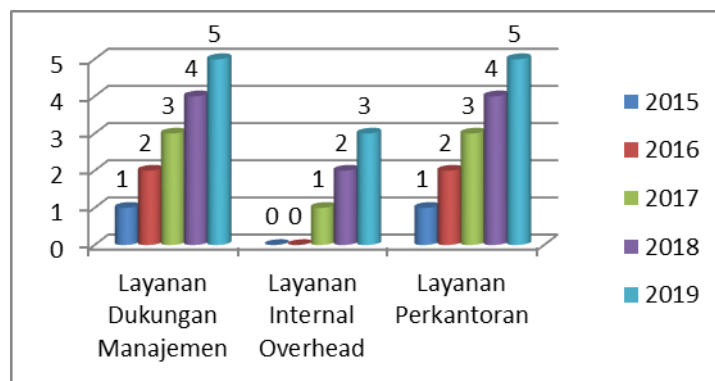
### SK7 Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali

• Pada Sasaran Strategis tujuh, capaian realisasinya diukur oleh dua indikator kinerja yaitu Jumlah Badan Publik yang Terkendali Penggunaan Bahasa dan Jumlah Badan Swasta yang Terkendali Pengunaan Bahasanya. Melihat dari tren capaian IKK dari tahun 2015—2019 (target akhir renstra) setiap tahunnya mengalami kenaikan di IKK jumlah badan publik. Sedangkan IKK jumlah badan swasta dua tahun terakhir (2018—2019) ini baru terlaksana dan terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan yaitu 100%. Pada tahun 2015—2017 untuk IKK jumlah badan swasta tidak ada target yang ditetapkan sehingga tidak ada realisasi yang dihasilkan.



### SK8 Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Badan Bahasa

• Sasaran Strategis Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Badan Bahasa ini didukung oleh tiga Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu Layanan Dukungan Manajemen Eselon I, Layanan Internal *Overhead* dan Layanan Perkantoran. Capaian ketiga indikator tersebut setiap tahunnya tercapai sesuai dengan target, kecuali layanan internal *overhead* tahun 2015—2016 tidak ada target yang akan dicapai. Melihat capaian kinerja tahunan 2015—2019 yang merupakan akhir tahun renstra, indikator kegiatan ini di tiap tahun menghasilkan satu layanan sesuai dengan target yang telah diperjanjikan. Berbagai upaya yang dilakukan untuk mendukung IKK ini sehingga apa yang ditargetkan dapat tercapai. Kegiatan yang terdapat di IKK ini adalah kegiatan yang menunjang operasional perkantoran atau kegiatan yang rutin dilaksanakan tiap tahunnya.

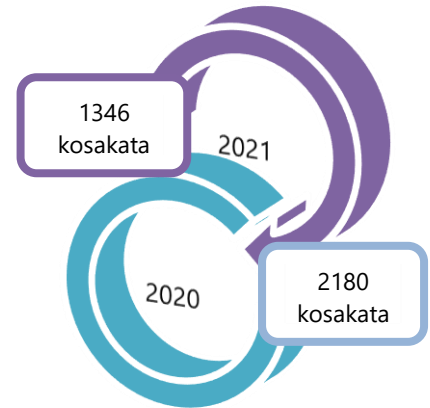


#### b. Capaian Tahun 2020—2021

Pada periode 2020—2021, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan lima sasaran program kegiatan (SK), yakni (1): Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia; (2) Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik; (3) Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina; (4) Terlindunginya Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam; (5) Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Berikut ini capaian BPP Bahasa tahun 2020—2021.

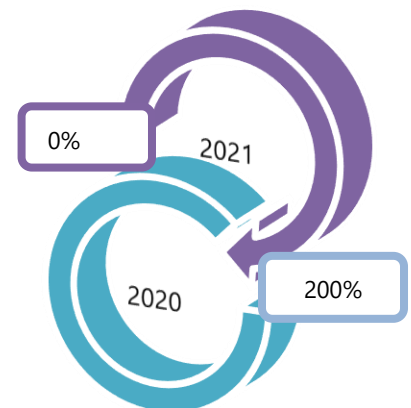
### SK1 Meningkatnya Daya Ungkap Bahasa Indonesia

- Capaian jumlah kosakata tahun 2020 tercapai 218% atau sebanyak 2180 kosakata dari target yang telah diperjanjikan yaitu 1000 kosakata. Pencapaian target kosakata tahun 2021 sebanyak 135% dengan jumlah 1346 kosakata dari target yang telah diperjanjikan yaitu 1000 kosakata. Pencapaian kosakata sebanyak ini akan menghasilkan dua produk setiap tahunnya yaitu satu produk data kosakata untuk KBBI dan satu produk kamus bahasa Bugis yang sudah dimutakhirkan. Diharapkan dengan capaian ini dapat memperkaya jumlah kosakata bahasa Indonesia yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).



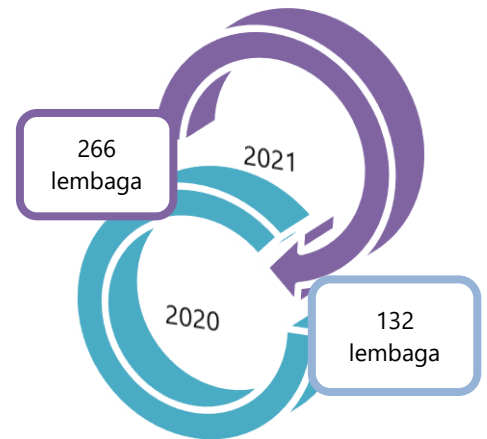
### SK2 Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia

- Capaian realisasi untuk Sasaran Kegiatan ini diukur oleh indikator kinerja Jumlah Rekomendasi Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian. Pada tahun 2020 capaian pada indikator kinerja melebihi dengan target yang telah di tentukan, capain sebanyak 200% dihasilkan dari beberapa kegiatan penyusunan jurnal dan majalah yang memuat berbagai macam penelitian sehingga menghasilkan dua rekomendasi kebijakan pada bidang kebahasaan dan kesastraan. Rekomendasi kebijakan ini dihasilkan secara mandiri melalui penelitian kebahasaan dan kesastraan yang diterbitkan melalui jurnal Sawerigading dan Bunga Rampai. Sasaran Kegiatan ini Sasaran Kegiatan ini tidak diprogramkan pada tahun 2021 sehingga tidak ada capaian target.



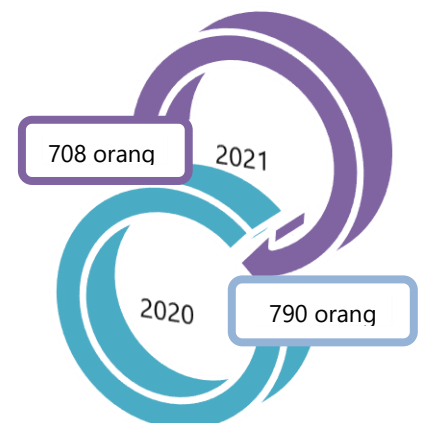
### SK3 Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik

- Capaian realisasi untuk Sasaran Kegiatan ini diukur oleh satu Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina. Capaian kinerja pada tahun 2020 sebesar 100% atau sebanyak 132 lembaga sesuai dengan target. Capaian target ini diperoleh melalui beberapa kegiatan yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota baik di lembaga pemerintah, lembaga swasta dan di media massa sehingga target yang diperoleh di 60 lembaga pemerintah, 60 lembaga swasta dan 12 media massa tercapai sesuai dengan harapan. Capaian kinerja untuk tahun 2021 sebesar 143% atau sebanyak 266 lembaga. Capaian ini melebihi target yang akan dicapai. Capaian target ini diperoleh melalui beberapa kegiatan yang dilakukan di beberapa kabupaten/kota baik di lembaga pemerintah, lembaga swasta media massa, dan sekolah.



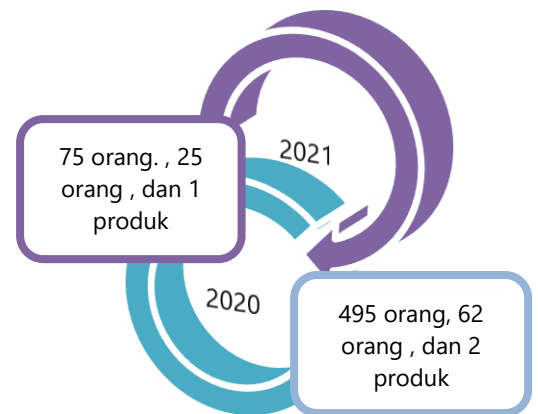
### SK4 Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina

- Meningkatnya Penutur Bahasa Terbina didukung oleh indikator Jumlah Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra. Capaian realisasi pada indikator kinerja kegiatan ini melebihi target pada tahun 2020 sebesar 790 orang dari target 690 atau sebesar 114%. Pada tahun 2021 capaian realisasi pada indikator kinerja kegiatan ini mencapai target yang sudah diperjanjikan, realisasi yang dicapai pada tahun 2021 sebesar 708 atau sebesar 100%.



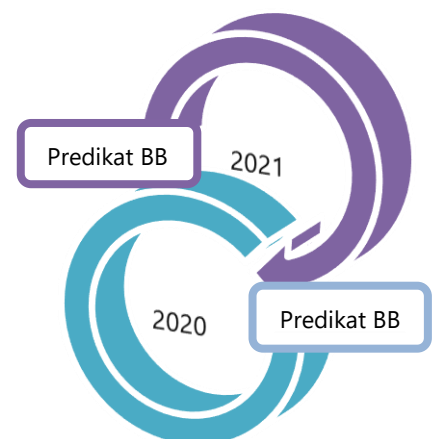
### SK5 Terlindunginya Bahasa dan Sastra Kritis dan Terancam Punah

• Untuk Sasaran Kegiatan “Bahasa dan Sastra Daerah yang Kritis dan Terancam Punah” diukur oleh tiga Indikator Kinerja Kegiatan yakni, Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan Terancam Punah, Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam Punah, Jumlah Produk Kesastraan yang Berkembangkan. Capaian realisasi pada indikator kinerja kegiatan tahun 2020 terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100% atau sebanyak 495 orang untuk bahasa daerah kritis dan terancam punah, 62 orang untuk sastra daerah kritis dan terancam punah, dan 2 produk kesastraan yang berkembang. Untuk tahun 2021 terealisasi sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sebesar 100% atau sebanyak 75 orang untuk bahasa daerah kritis dan terancam punah, 25 orang untuk sastra daerah kritis dan terancam punah, dan 1 produk kesastraan yang berkembang.



### SK6 Meningkatnya Tata Kelola di Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

• Meningkatnya Tata Kelola di Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didukung oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu “ Predikat Sakip Minimal BB” dan “ Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91. Pada tahun 2020 dan 2021 capaian kinerja tercapai dengan nilai sakip Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan adalah BB sesuai dengan target yang telah dikontrak kinerjakan.



## **1.2 Permasalahan dan Potensi**

Potensi dan permasalahan bidang kebahasaan dan kesastraan dijabarkan dalam analisis lingkungan strategis dan potensi serta tantangan sebagai berikut.

### **A. Permasalahan dan Analisis**

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada periode 2015—2019, dapat diidentifikasi permasalahan yang menjadi perhatian utama dalam pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan untuk periode 2020—2024 sebagai berikut.

1. Permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian target jumlah kosakata Indonesia adalah sudah banyak kosakata bahasa daerah yang sudah diusulkan sehingga ada beberapa daerah yang jumlah kosakata yang akan diusulkan terbatas, kosakata yang akan diusulkan ke dalam KBBI betul-betul diambil dari kosakata yang belum ada padanannya dalam KBBI, masih kurangnya SDM yang ahli di bidang kosakata.
2. Permasalahan pada sasaran kegiatan Meningkatkan Bahasa dan Sastra yang Terlindungi adalah ketidakpedulian pemerintah daerah dan masyarakat untuk melestarikan sastra daerah dan pengambilan data pemetaan bahasa memerlukan ekstra tenaga karena akses ke daerah pengamatan melalui medan yang sangat berat.
3. Permasalahan pada sasaran kegiatan Mutu dan Jumlah Bahan Ajar Pengayaan pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia untuk IKK Penelitian Bahasa dan Sastra adalah waktu yang dialokasikan untuk pengambilan data masih kurang lama, data yang dibutuhkan terkadang sulit ditemukan disebabkan akses dan medan ke titik pengamatan sangat sulit ditempuh. Sedangkan permasalahan untuk IKK Publikasi Ilmiah Bahasa dan Sastra adalah Kurangnya pengetahuan penulis tentang online jurnal sistem (OJS), sehingga mereka kesulitan untuk mensubmit ke jurnal kami, artikel yang masuk terkadang tidak sesuai

dengan templet yang sudah di buat, penulis terkadang tidak tepat waktu melakukan perbaikan-perbaikan dari reviewer, sumber Daya Manusia yang masih kurang dan memahami tentang Sistem OJS (*Online Jurnal System*).

4. Permasalahan pada sasaran kegiatan Mutu dan Bahan Ajar Pengayaan Pembelajaran Bahasa dan Sastra Indonesia adalah kurangnya informasi yang sampai kemasyarakat tentang kegiatan sayembara, naskah yang masuk kurang tidak sesuai dengan target, naskah yang masuk tidak sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
5. Permasalahan pada sasaran kegiatan Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra adalah dukungan dari pemerintah daerah yang masih sangat minim dan tidak terlalu merespon beberapa kegiatan yang dilakukan. Selain itu, jumlah peserta pada festival musikalisasi puisi sangat banyak yang memenuhi kualifikasi tetapi kuota yang disediakan sangat terbatas, sehingga sulit menentukan peserta yang lolos. Permasalahan terakhir adalah pembinaan Gerakan Literasi yang dilakukan hanya ke beberapa kota yang ada di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat sehingga sulit memenuhi atau menjangkau beberapa komunitas literasi yang memerlukan binaan.
6. Permasalahan pada sasaran kegiatan Jumlah Ruang Publik yang Terkendali adalah keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para jurnalis sehingga sulit untuk memberikan penyengaran tentang penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Selain itu, jurnalis/wartawan memiliki gaya bahasa tersendiri dalam menggunakan Bahasa di Media Massa.
7. Permasalahan pada sasaran kegiatan Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Badan Bahasa untuk IKK Layanan Dukungan Manajemen Eselon I adalah keterbatasan SDM, sarana dan

prasarana yang masih kurang memadai sehingga tidak mampu menunjang tata kelola perkantoran dengan baik. Permasalahan yang ditemukan untuk IKK Layanan Internal *Overhead* adalah waktu pelaksanaan yang tidak sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Selain itu, proses penginputan ke aplikasi Sarembaja dan Simple tidak sesuai jadwal.

## **B. Potensi**

Potensi yang dimiliki di daerah dapat membantu dalam pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang diharapkan dapat memberikan dampak yang luas bagi masyarakat. Beberapa potensi yang perlu dioptimalkan sebagai berikut.

### **1. Potensi Pengembangan Bahasa dan Sastra**

Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan sumber daya alam yang dimiliki kedua provinsi tersebut menumbuhkan keanekaragaman budaya sesuai dengan situasi lingkungan alamnya. Dengan demikian, dapat dibayangkan betapa beragamnya kosakata bahasa daerah yang menggambarkan kondisi itu, belum termasuk aneka kosakata yang mendeskripsikan berbagai hasil olahan produk setempat yang khas dan unik. Kekayaan kosakata yang dimiliki sebagai potensi yang besar untuk menghasilkan kamus bahasa daerah, kamus istilah, tesaurus, dan glosarium. Keberadaan kamus dapat menjadi sumber rujukan bagi masyarakat dalam berbagai bidang yang digeluti. Diharapkan, dengan adanya produk kodifikasi bahasa tersebut dapat meningkatkan layanan kebahasaan kepada masyarakat.

### **2. Potensi Pelindungan Bahasa dan Sastra**

Berdasarkan Peta Bahasa Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bahasa daerah di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat berjumlah 23 bahasa. Bahasa daerah di Sulawesi Selatan berjumlah 14 Bahasa dan di Sulawesi Barat berjumlah 9 bahasa. Dari banyaknya bahasa daerah yang ada

di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, masih ada beberapa bahasa daerah yang belum dilakukan konservasi dan revitalisasi. Menurut PP Nomor 57 Tahun 2014, perlindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, dan pengajarannya. Oleh karena itu, perlindungan bahasa di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masih perlu dilakukan, mengingat bahwa bahasa daerah sebagai salah satu produk kebudayaan yang perlu dilestarikan dan dilindungi.

Pelindungan sastra di Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat masih berpotensi untuk dilakukan. Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat memiliki keanekaragaman budaya. Keanekaragaman tersebut menghasilkan banyaknya warisan budaya yang dimiliki oleh setiap daerah, baik secara lisan maupun tulisan yang sangat perlu untuk didokumentasikan. Dokumen yang bersejarah tersebutlah yang perlu dilestarikan dan dilindungi untuk diwariskan kepada generasi muda. Sastra lisan dan tulisan memiliki tata nilai budaya termasuk etika dan moral yang dijadikan sebagai pedoman hidup masyarakat setempat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa perlindungan sastra masih berpotensi dilakukan di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat, karena hilangnya dokumentasi budaya suatu bangsa akan berpengaruh pada peradaban suatu bangsa.

### **3. Potensi Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina**

Penggunaan bahasa Indonesia telah diatur dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia. Berdasarkan peraturan tersebut Penggunaan Bahasa Indonesia sangat penting untuk lembaga baik pemerintah maupun swasta. Penggunaan bahasa Indonesia untuk lembaga di Provinsi Sulawesi Selatan dan Barat masih jauh dari yang diharapkan. Masih banyak instansi pemerintah dan swasta yang tidak menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar di ruang publik. Oleh karena itu, masih berpotensi untuk terus melakukan pembinaan

kepada lembaga pengguna bahasa Indonesia untuk memartabatkan bahasa Indonesia.

#### **4. Potensi Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia untuk Calon Tenaga Profesional dan Tenaga Profesional**

Kompetensi penutur dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar diukur melalui Ujian Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI). UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam dan luar negeri, tetapi juga untuk memupuk sikap positif dan rasa bangga masyarakat Indonesia terhadap bahasanya. Kemampuan berbahasa Indonesia dititikberatkan pada peserta didik, namun pada kenyataannya guru juga sangat memerlukan peningkatan kemampuan berbahasa. Guru sebagai pendidik dan sebagai fasilitator di sekolah perlu meningkatkan kemampuannya dalam berbahasa Indonesia. Begitu pula dengan mahasiswa sebagai calon tenaga pendidik sangat memerlukan peningkatan kompetensi dalam berbahasa Indonesia. Jadi, kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia untuk calon tenaga profesional dan tenaga professional masih berpotensi untuk terus dilakukan.

#### **5. Potensi Kerja Sama**

Kerja sama dengan pemangku kepentingan di daerah sangat perlu untuk ditingkatkan. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan telah bekerja sama dengan beberapa pemangku kepentingan dalam bentuk MoU. Baru-baru ini telah dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota, dan Pemerintah Daerah. Semua program yang dilakukan perlu mendapatkan dukungan dari pemerintah daerah agar berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu perlu adanya sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

## **BAB II**

### **TUJUAN DAN SASARAN**

#### **VISI**

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa tahun 2020—2024 dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang diturunkan dari visi Presiden, dengan rumusan sebagai berikut.

*“Mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan YME, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.”*

Dari rumusan visi di atas, Indonesia maju terwujud ketika bangsa Indonesia berdaulat, mandiri, dan berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan untuk *membentuk sumber daya manusia Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional.*

#### **MISI**

Untuk mencapai visi dan misi Kemendikbudristek dalam *Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa dan Sastra*, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan mengikuti misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, sebagai berikut.

1. Mewujudkan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan sastra dalam Pendidikan.
2. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional
3. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah.
4. Mengoptimalkan tata kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang partisipatif, transparan, dan akuntabel.

## 2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan serta untuk mendukung pencapaian tujuan strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Sulawesi Selatan menetapkan tujuan strategis yang akan dicapai. Tujuan strategis diambil dari sasaran program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu:

Kode	Tujuan dan Indikator	Satuan	Target					
			Baseline	2021	2022	2023	2024	
SS.3	Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan							
IKSS 3.1	Indeks kemahiran berbahasa Indonesia	indeks	57	63	69	75	81	
SS.5	Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel							
IKSS 5.3	Predikat SAKIP Kemendikbudristek	predikat	BB	BB	BB	A	A	

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan Indikator Kinerja Tujuan (IKT) untuk mencapai tujuan strategis di atas. Penetapan IKT berpatokan kepada Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Penetapannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan. IKT tersebut terdiri atas empat hal sebagai berikut.

1. Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan;

2. Meningkatnya Peran Bahasa Indonesia di Kancah Internasional;
3. Meningkatnya Kelestarian Bahasa Daerah;
4. Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Adapun target Indikator Kinerja Tujuan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan sesuai dengan target akhir renstra tahun 2024 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan		
		Indikator	Satuan	Target 2024
1	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Persentase	72
		Persentase lembaga terbina yang meningkat kualitas penggunaan bahasanya	Persentase	91.99
2	Meningkatnya peran bahasa Indonesia di kancah Internasional	Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	Negara	50
3	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Indeks	20.54
4	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Predikat	A

## 2.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran yang ditetapkan oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan merupakan sasaran kegiatan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020--2024. Adapun sasaran kegiatan yang ditetapkan adalah sebagai berikut.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan
1	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra
2	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan
3	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
		Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina
4	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
5	Tersedianya produk diplomasi bahasa	Jumlah produk penerjemahan
6	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah
7	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan
		Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

Sasaran Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2020—2024 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Kode	SK/IKK	Satuan	Target Renstra		
			2022	2023	2024
<b>SK 1</b>	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra				
<b>IKK 1.1</b>	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	produk	2	2	2
<b>SK 2</b>	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan				
<b>IKK 2.1</b>	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	orang	1186	1223	1261
<b>SK 3</b>	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan				
<b>IKK 3.1</b>	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	lembaga	45	45	45

<b>IKK 3.2</b>	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	lembaga	20	20	20
<b>SK 4</b>	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA				
<b>IKK 4.1</b>	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	orang	65	65	65
<b>SK 5</b>	Tersedianya produk diplomasi bahasa				
<b>IKK 5.1</b>	Jumlah produk penerjemahan	produk	8	46	46
<b>SK 6</b>	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah				
<b>IKK 6.1</b>	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	orang	290	291	292
<b>SK 7</b>	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan				
<b>IKK 7.1</b>	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	predikat	BB	BB	BB
<b>IKK 7.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	nilai	93	94	95

### BAB III

## ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

### 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan memiliki arah kebijakan dan strategi yang mengacu pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan kebijakan dan strategi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, terutama dalam mewujudkan pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan. Arah kebijakan ditujukan pada tiga kebijakan prioritas, yaitu

1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan,
2. perlindungan bahasa dan sastra daerah, dan
3. internasionalisasi bahasa Indonesia.

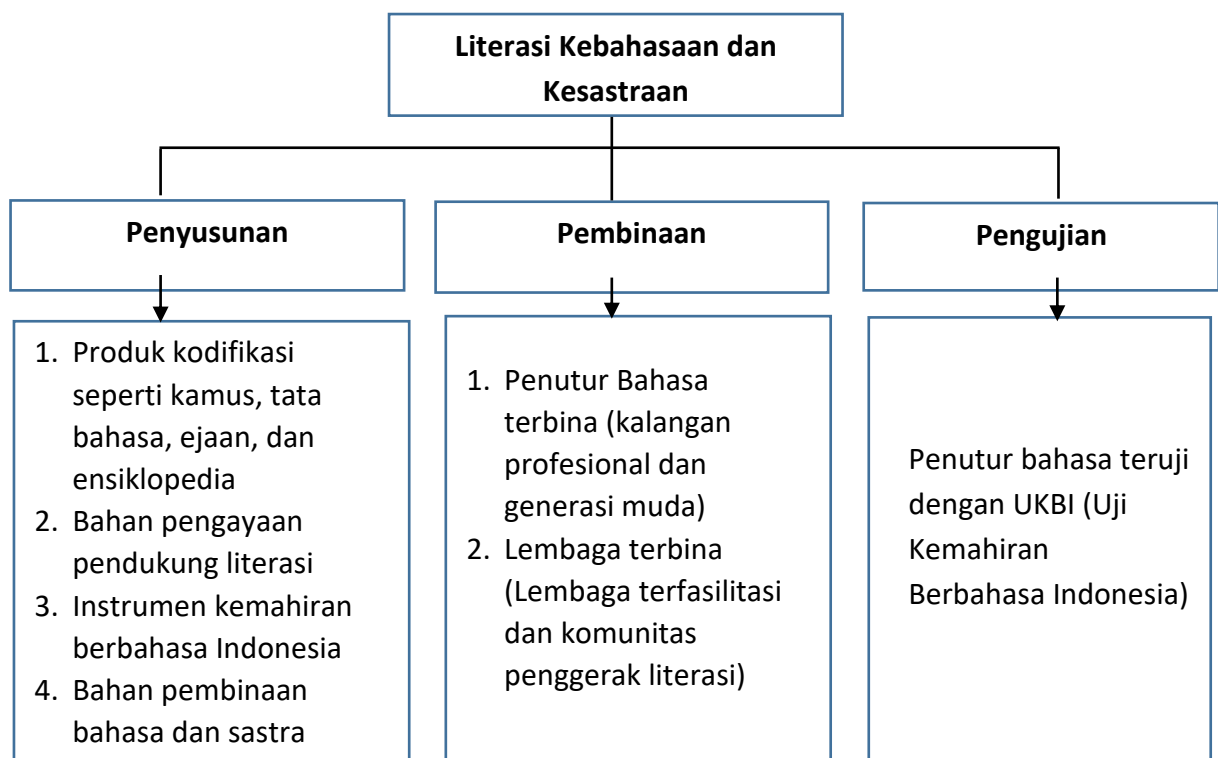


**Fokus kebijakan pertama** ialah *penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan*.

Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya BPP Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi

kebahasaan dan kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.

Dalam implementasinya, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan mencakup penyusunan bahan pengayaan literasi, pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan bahan pengayaan literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan kesastraan yang dihasilkan oleh BPP Bahasa dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata bahasa, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Sementara itu, dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, misalnya pembinaan penutur bahasa, pembina lembaga (termasuk komunitas), layanan ahli bahasa, serta dan pengujian kemahiran berbahasa Indonesia.



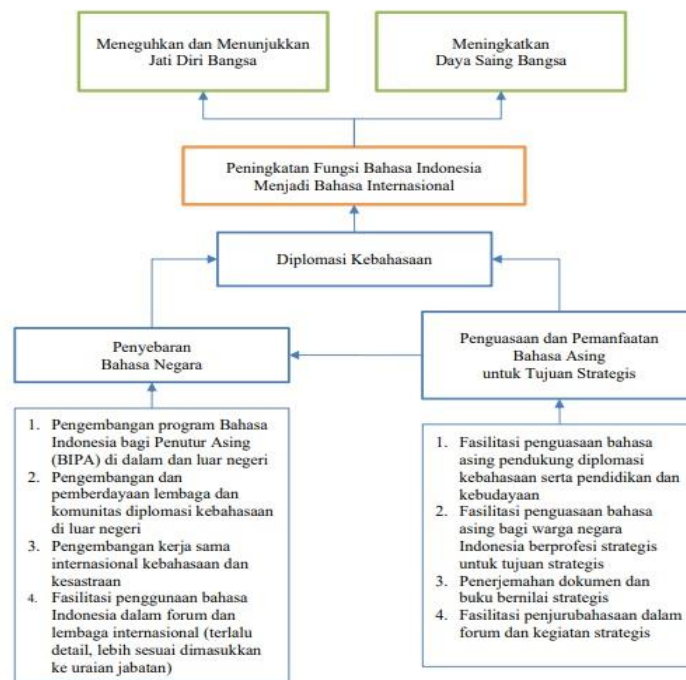
**Fokus kebijakan kedua** ialah *pelindungan bahasa dan sastra daerah*. Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.

Dari berbagai aktivitas pelindungan bahasa daerah, prioritas dalam Renstra periode ini diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.

Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah tertentu.

**Fokus kebijakan ketiga** berkaitan dengan *internasionalisasi bahasa Indonesia*. Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi *Lingua Franca Plus* ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, Badan Bahasa melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan penerjemahan

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam penyusunan regulasi, serta pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar negeri secara langsung juga berdampak pada negara yang Lembaga di dalamnya mengajarkan Bahasa Indonesia.



Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk mendukung upaya tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran BIPA. Sementara itu, penerjemahan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dilakukan untuk menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia yang handal, baik di Badan Bahasa secara khusus maupun di masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Bahasa telah bekerja sama dengan Kementerian Ketenagakerjaan untuk menerbitkan lima Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bagi penerjemah dan juru bahasa.

### 3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membutuhkan kerangka regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan	Target Penyelesaian
1.	RSKKNi bidang pengajaran BIPA	Penguatan tentang Standar Kompetensi Pengajar BIPA	2022
2.	Peraturan tentang standar penyelenggaraan program BIPA	Penguatan regulasi yang mengatur standar penyelenggaraan program BIPA	2024
3.	Peraturan tentang peta jalan internasionalisasi bahasa Indonesia	Sebagai rujukan pelaksanaan program penginternasionalan bahasa Indonesia	2023
4.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Penerjemah Teks Sastra	Penjaminan mutu penerjemah dan terjemahan teks sastra	2022
5.	Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) Bidang Penerjemahan dan Penjurubahasaan	Pelaksanaan aturan tentang Standar Kompetensi Kerja Nasional dalam bidang penerjemahan dan penjurubahasaan	2023
6.	Revisi Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	UKBI masih bersifat imbauan dan belum diwajibkan bagi masyarakat Indonesia yang berpendidikan dan berbudaya	2023
7.	Peraturan tentang Pedoman Pengawasan Penggunaan Bahasa Indonesia	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam pengawasan bahasa untuk melaksanakan Pasal 42 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penggunaan Bahasa Indonesia	2023
8.	Peraturan tentang Pedoman dan Acuan Kebahasaan	Penyempurnaan PUEBI, PUPI, dan pedoman lainnya	2022
9.	Revisi PP Nomor 82 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak	Pengurangan tarif mahasiswa dan penyesuaian tarif penutur asing	2023
10.	Peraturan tentang tarif PNBPN di lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan tarif nol dalam PNBPN UKBI sangat penting untuk mewujudkan peningkatan kemahiran mahasiswa dan pemangku kebijakan	2023
11.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pekamus dan Penata Istilah	Penguatan kebijakan BPP Bahasa dalam fungsi pengembangan Bahasa Indonesia dan Bahasa Daerah	2024
12.	Peraturan tentang Standar Kompetensi Pembaku dan	Pentingnya aturan mengenai Standar Kompetensi Penyusun Kaidah Bahasa	2024

	Pengodifikasi Kaidah Bahasa Indonesia	Indonesia	
13.	Revisi Permendikbud 44 Nomor 2020 tentang Bantuan Pemerintah di Lingkungan Kemendikbudristek	Penambahan sasaran penerima banpem agar mencakupi juga komunitas kebahasaan dan kesastraan	2022
14.	Perpres tentang Pembudayaan Literasi	Tindaklanjuti UU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Sistem Perbukuan, serta PP Nomor 75 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2017	2024
15.	Permendikbudristek tentang pedoman kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai pedoman bagi unit kerja dalam melakukan penghitungan kebutuhan jabatan fungsional Widyabasa	2022
16.	Perpres tentang tunjangan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan menentukan besaran jumlah tunjangan fungsional jabatan fungsional Widyabasa	2023
17.	Permendikbudristek tentang uji kompetensi jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan terkait kompetensi yang dibutuhkan pegawai untuk menduduki jabatan fungsional Widyabasa	2022
18.	Permendikbudristek tentang pedoman <i>inpassing</i> jabatan fungsional Widyabasa	Sebagai acuan dalam menentukan proses <i>inpassing</i> jabatan fungsional Widyabasa	2022

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang mengacu pada visi dan misi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan perlu didukung dengan kerangka kelembagaan yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan tugas dan fungsinya. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi.

Kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan dapat diilustrasikan dalam bagan berikut.



Struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan tersebut sesuai dengan Permendikbudristek nomor 12 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Balai dan Kantor Bahasa. Dalam Permendikbudristek tersebut juga dijabarkan tugas dan fungsi balai dan kantor bahasa. Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Permendikbudristek mempunyai tugas untuk melaksanakan perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Sulawesi Barat. Dalam melakukan tugas tersebut, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan menyelenggarakan fungsi, antara lain:

- a. pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra daerah;
- b. pelaksanaan inventarisasi kosakata dan karya sastra;
- c. pelaksanaan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah;
- d. pelaksanaan pemasyarakatan bahasa Indonesia;
- e. pelaksanaan fasilitas perlindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra;
- f. pemberian layanan kebahasaan dan kesastraan;
- g. pelaksanaan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan;
- h. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan; serta

i. pelaksanaan urusan administrasi.

Secara kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Sulsel dipimpin oleh dua orang pejabat struktural, kepala balai dan kepala subbagian umum. Setelah melalui perpindahan beberapa pegawai teknis (peneliti) ke Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Balai Bahasa Provinsi Sulsel memiliki 35 pegawai yang terdiri atas 2 pejabat struktural, 14 tenaga fungsional, dan 19 tenaga administrasi. Selain itu, terdapat pula 9 tenaga PPNPN.



### 3.4 Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperbaharui. Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional

serta pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis organisasi pemerintahan. Berdasarkan latar belakang tersebut, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (sekarang Kemendikbudristek) periode 2020—2024 adalah menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pemerintahan yang berkelas dunia sejalan dengan Visi Indonesia 2045.

Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020--2024 dan sebagaimana tertulis dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020—2024, yaitu terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel serta terciptanya birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima.

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga terus melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik meliputi delapan area perubahan, yakni

1. Manajemen Perubahan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada area manajemen perubahan melakukan transformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja ASN melalui aplikasi Gerbang Elektronik Sistem Informasi Terpadu (GESIT) yang memberikan informasi layanan publik, layanan kepegawaian, dan layanan administrasi lembaga.

2. Deregulasi Kebijakan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam pelaksanaan deregulasi kebijakan telah mengidentifikasi dan menganalisis aturan yang

berkaitan dengan kebahasaan dan kesastraan agar tidak ada regulasi yang tumpang tindih atau berbenturan.

### 3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam penataan dan penguatan organisasi telah melakukan evaluasi organisasi dan mengusulkan naskah akademik perubahan organisasi untuk memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.

### 4. Penataan Tata Laksana

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam mewujudkan penataan tata laksana yang efisien dan efektif serta prosedur kerja yang jelas dan terukur telah menyusun peta proses bisnis level IV.

#### a. Penataan Sistem Manajemen SDM

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penataan sistem manajemen SDM meningkatkan kompetensi pegawai agar terwujud SDM aparatur yang profesional.

#### b. Penguatan Akuntabilitas

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penguatan akuntabilitas telah melaksanakan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

#### c. Penguatan Pengawasan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka penguatan pengawasan telah membentuk unit pengendali gratifikasi sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

#### d. Peningkatan Kualitas Pelayanan

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan berusaha untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara layanan publik dengan cara melakukan evaluasi pelayanan secara berkala.

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu cara untuk mewujudkan layanan prima tersebut, yaitu dengan memanfaatkan berbagai aplikasi, misalnya Halo Bahasa dan Sipebi (aplikasi penyuntingan ejaan bahasa Indonesia). Penggunaan aplikasi-aplikasi tersebut bertujuan agar layanan dan produk Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa lebih mudah diakses oleh pengguna layanan dan lebih luas jangkauannya.

Dari sisi sumber daya manusia, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa melakukan peningkatan kompetensi secara bertahap bagi seluruh pegawai. Dengan adanya pengelompokan kepakaran diharapkan kebutuhan dan pelaksanaan kompetensi seluruh pegawai lebih maksimal dan nantinya akan meningkatkan kualitas layanan.

Selain aplikasi dan SDM, satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didorong untuk menjadi satuan kerja berpredikat Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Tiap tahun, sebanyak lima satuan kerja diusulkan untuk mendapatkan status ZI-WBK dan satu satuan kerja ditargetkan memperoleh predikat tersebut. Makin banyak satuan kerja yang berpredikat ZI-WBK, makin menunjukkan kinerja organisasi yang baik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan.

**BAB IV**  
**TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN**

**4.1 Target Kinerja**

Dalam mendukung tercapainya kinerja Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target kinerja yang akan dicapai selama periode lima tahun ke depan yaitu 2020 – 2024. Target kinerja ditetapkan pada masing-masing indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian target kinerja yang akan dicapai Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan selama lima tahun ke depan. Sasaran dan indikator kinerja ditampilkan berdasarkan dua periode pelaksanaan, yaitu sasaran dan indikator tahun 2020—2021 dan sasaran dan indikator tahun 2022—2024.

**4.1.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2020—2021**

Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan tahun 2020—2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Kode	SK/IKK	Satuan	Target Renstra	
			2020	2021
<b>5289</b>	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah			
<b>SK</b>	Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik			
<b>IKK</b>	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	lembaga	132	186
<b>SK</b>	Meningkatnya jumlah Penutur Bahasa Terbina			
<b>IKK</b>	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	orang	690	708
<b>SK</b>	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia			
<b>IKK</b>	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	dokumen	1	-
<b>SK</b>	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia			

<b>IKK</b>	Jumlah kosakata bahasa Indonesia	kosakata	1000	1000
<b>SK</b>	Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah			
<b>IKK</b>	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	orang	495	75
<b>IKK</b>	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam perlindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	orang	62	25
<b>IKK</b>	Jumlah Produk Kesastraan Berkembang	produk	2	1
<b>2020</b>	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis			
<b>SK</b>	Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa			
<b>IKK</b>	Predikat Sakip Satker minimal BB	predikat	BB	BB
<b>IKK</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- KL Satker Minimal 91	nilai	91	91

#### 4.1.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022—2024

Pada periode 2022—2024, terdapat sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan serta target kinerja sebagai berikut.

Kode	SK/IKK	Satuan	Target Renstra		
			2022	2023	2024
<b>SK 1</b>	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra				
<b>IKK 1.1</b>	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	produk	2	2	2
<b>SK 2</b>	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan				
<b>IKK 2.1</b>	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	orang	1186	1223	1261
<b>SK 3</b>	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan				
<b>IKK 3.1</b>	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	lembaga	45	45	45

<b>IKK 3.2</b>	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	lembaga	20	20	20
<b>SK 4</b>	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA				
<b>IKK 4.1</b>	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	orang	65	65	65
<b>SK 5</b>	Tersedianya produk diplomasi bahasa				
<b>IKK 5.1</b>	Jumlah produk penerjemahan	produk	8	46	46
<b>SK 6</b>	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah				
<b>IKK 6.1</b>	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	orang	290	291	292
<b>SK 7</b>	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan				
<b>IKK 7.1</b>	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	predikat	BB	BB	BB
<b>IKK 7.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	nilai	93	94	95

## 4.2 Kerangka Pendanaan

Dalam rangka pencapaian sasaran strategis diperlukan sumber daya anggaran sebagai pendukung. Anggaran yang digunakan dalam pencapaian sasaran strategis yang ditetapkan di Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan hanya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diberikan pemerintah. Berikut rincian alokasi anggaran yang dibutuhkan dalam pencapaian target kinerja yang ditetapkan selama lima tahun. Berikut kerangka pendanaan yang dibagi ke dalam dua periode.

### Periode TA 2020--2021

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Rencana Pendanaan (ribu)	
			2020	2021
1.	Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia	1. Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia	201.478	491.274

2.	Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia	1. Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan melalui Penelitian	215.125	225.000
3.	Terwujudnya Penggunaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik	1. Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina	790.289	965.526
4.	Meningkatnya Jumlah Penutur Bahasa Terbina	1. Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina Kemahiran Berbahasa dan Bersastra	396.000	522.500
5.	Terlindunginya bahasa dan Sastra daerah yang kritis dan terancam	1. Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis dan	370.460	667.512
		2. Jumlah Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis dan Terancam	224.679	141.666
		3. Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	175.000	175.000
6.	Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	1. Predikat SAKIP Satker minimal BB	413.890	462.610
		2. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-	5.613.700	5.849.936

#### Periode TA 2022—2024

SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	PAGU ANGGARAN (RIBUAN)		
		2022	2023	2024
<b>Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra</b>	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	125,000	128,750	132,613
<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan</b>	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	1,114,328	1,183,338	1,256,622

<b>Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan</b>	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	249,254	256,732	264,434
	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	154,976	159,625	164,414
<b>Meningkatnya jumlah pelajar BIPA</b>	Jumlah pelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	124,347	128,077	131,920
<b>Tersedianya produk diplomasi bahasa</b>	Jumlah produk penerjemahan	200,000	1,194,800	1,230,644
<b>Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah</b>	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	1,056,997	1,094,157	1,132,768
<b>Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan</b>	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	738,044	791,044	814,775
	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	6.269.936	6.279.936	6.281.936

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Revisi Renstra Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan perubahan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020—2024. Lingkup tugas dan fungsi untuk periode 5 tahun (2020 hingga 2024) memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, kerangka pendanaan yang bersifat indikatif, program, dan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia. Dengan demikian, renstra ini berperan penting untuk menuntun lembaga dalam menyusun (1) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), (2) Rencana Kinerja Tahunan (RKT), (3) Penetapan Kinerja (PK), dan (4) Laporan Kinerja (Lakin).

Dalam RPJMN 2020—2024, pengembangan dan pembinaan Bahasa dan sastra mendapatkan tempat yang strategis, yaitu sebagai program prioritas dan kegiatan prioritas. Oleh sebab itu, penempatan tersebut perlu didukung dengan menindaklanjutinya ke dalam program dan kegiatan yang tepat sasaran. Rencana strategis Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan ini disusun guna memandu arah pelaksanaan program agar selaras dengan amanat dalam RPJMN tersebut.

Penetapan target dan pendanaan dalam Renstra ini dilaksanakan setelah mengevaluasi pencapaian renstra periode sebelumnya dan mempertimbangkan perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional yang telah ditetapkan oleh Presiden terkait dengan perubahan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Kehadiran renstra ini menjadi acuan bagi Penyusunan

Program dan anggaran serta pelaksanaan Kegiatan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan selama lima Tahun kedepan.

## Lampiran 1: Matriks Kinerja dan Pendanaan

### MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SEBELUM PERUBAHAN BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020—2024

Kode	Sasaran Program/Sasaran kegiatan/Indikator (IKSS,IKP,IKK)	Satuan	Target					Alokasi (Rp dalam ribuan)				
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
<b>5289</b>	Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah											
<b>SK Terwujudnya Pengutamaan Bahasa Indonesia di Ruang Publik</b>												
<b>IKK</b>	Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina	lembaga	132	186	120	120	120	790.289	965.526	825.000	980.000	980.000
<b>SK Meningkatkan jumlah Penutur Bahasa Terbina</b>												
<b>IKK</b>	Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra	orang	690	708	800	1	1.2	396.000	522.500	578.900	578.900	711.600
<b>SK Terwujudnya Standar Kemahiran Berbahasa Indonesia</b>												
<b>IKK</b>	Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian	dokumen	1	-	1	1	1	215.125	225.000	225.000	235.315	234.415
<b>SK Meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia</b>												
<b>IKK</b>	Jumlah kosakata bahasa	kosakata	1000	1000	1000	1000	1000	201.478	491.274	525.000	575.000	625.000

<b>SK Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah</b>												
<b>IKK</b>	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis dan terancam punah	orang	495	75	820	820	900	370.460	667.512	667.512	710.000	730.000
<b>IKK</b>	Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan terancam punah	Orang	62	25	25	60	60	224.679	141.666	286.666	330.000	344.000
<b>IKK</b>	Jumlah Produk Kesastraan Terkembangkan	Produk	2	1	5	6	6	175.000	175.000	225.000	250.000	275.000
<b>2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis</b>												
<b>SK.Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa</b>												
<b>IKK</b>	Predikat Sakip Satker minimal BB	predikat	BB	BB	BB	BB	BB	413.890	462.610	578.850	578.850	624.400
<b>IKK</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA- KL Satker Minimal 91	nilai	91	91	93	94	95	5.613.700	5.849.936	6.269.936	6.279.936	6.281.936

**MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN SETELAH PERUBAHAN  
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN TAHUN 2020—2024**

Kode	SK/IKK	Satuan	Target Renstra			Alokasi (Rp dalam Ribuan)		
			2022	2023	2024	2022	2023	2024
<b>SK 1</b>	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra							
<b>IKK 1.1</b>	Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	produk	2	2	2	125,000	128,750	132,613
<b>SK 2</b>	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan							
<b>IKK 2.1</b>	Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	orang	1186	1223	1261	1,114,328	1,183,338	1,256,622
<b>SK 3</b>	Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan							
<b>IKK 3.1</b>	Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	lembaga	45	45	45	249,254	256,732	264,434
<b>IKK 3.2</b>	Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	lembaga	20	20	20	154,976	159,625	164,414
<b>SK 4</b>	Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA							
<b>IKK 4.1</b>	Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)	orang	65	65	65	124,347	128,077	131,920
<b>SK 5</b>	Tersedianya produk diplomasi bahasa							
<b>IKK 5.1</b>	Jumlah produk penerjemahan	produk	8	46	46	200,000	1,194,800	1,230,644
<b>SK 6</b>	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah							
<b>IKK 6.1</b>	Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah	orang	290	291	292	1,056,997	1,094,157	1,132,768
<b>SK 7</b>	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan							

<b>IKK 7.1</b>	Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	predikat	BB	BB	BB	738,044	791,044	814,775
<b>IKK 7.2</b>	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	nilai	93	94	95	6.269.936	6.279.936	6.281.936

## Lampiran 2: Definisi Operasional

<b>SK : Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra</b>			
<b>IKK : Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra</b>			
<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<p>Produk pengembangan bahasa dan sastra adalah produk kodifikasi kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra bekerja sama dengan UPT Balai/Kantor untuk meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia melalui penjarangan leksikon bahasa daerah. Produk kodifikasi juga sebagai bentuk pendokumentasian bahasa Indonesia dan daerah dalam bentuk kamus, tesaurus, glosarium, ensiklopedia dan korpus.</p>	<p>Jumlah produk yang dihasilkan baik dalam bentuk usulan kosakata, kamus, glosarium, tesaurus, dan ensiklopedia</p> <p>Satuan: Produk Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	Laporan internal	Koordinator KKL Perkamusan dan Peristilahan

**SK : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan****IKK : Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan**

<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan diukur melalui peningkatan kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda. Bentuk pembinaannya adalah dengan melakukan pembinaan literasi generasi muda dan melaksanakan pengujian dan pelatihan kemahiran berbahasa Indonesia	Menjumlahkan seluruh peserta atau penutur bahasa yang terbina. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut $JPT = \sum P$ Keterangan: JPT = Jumlah penutur terbina P = Peserta kegiatan  Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Non Kumulatif	Laporan internal	Koordinator KKLP Literasi dan Koordinator KKLP UKBI

**SK : Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan****IKK : Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya**

<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
<p>Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya mengikuti pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaganya.</p> <p>Lembaga dalam hal ini adalah lembaga yang menjadi sasaran dalam pembinaan penggunaan bahasa Negara di ruang publik. Lembaga yang menjadi sasaran adalah lembaga pendidikan, lembaga pemerintah, dan lembaga swasta berbadan hukum.</p> <p>Bentuk pembinaannya meliputi audiensi, sosialisasi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan dan pemberian penghargaan</p>	<p>Menjumlahkan seluruh lembaga yang menjadi sasaran pembinaan bahasa. Penghitungan dilakukan dengan rumus berikut.</p> $JLT = \sum L$ <p>Keterangan: JLT = Jumlah lembaga terbina L = Lembaga yang terbina</p> <p>Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif</p>	Laporan internal	Koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum

**SK : Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan****IKK : Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina**

<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina didapatkan dari pendataan komunitas literasi. Komunitas literasi yang telah didata akan dibina melalui pemberdayaan komunitas literasi. Kegiatan pemberdayaan komunitas literasi dilakukan untuk membina dan meningkatkan kompetensi para ketua/pengurus komunitas literasi dalam hal penguatan manajemen komunitas literasi, pengelolaan buku dan pojok baca, penyusunan program komunitas literasi yang kreatif, cerdas berliterasi digital, serta peningkatan kompetensi pembelajaran literasi di komunitas literasi. Setelah mengikuti kegiatan bimbingan teknis ini, mereka diharapkan mampu mengaplikasikannya di komunitas literasi mereka masing-masing. Jadi, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah memberdayakan para ketua/pengurus komunitas literasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terkait penyediaan buku bacaan literasi, pembelajaran literasi (khususnya literasi baca—tulis bagi anak usia dini dan kelas awal), pembiasaan cerdas berliterasi digital di masyarakat (sehingga masyarakat	Menjumlahkan seluruh lembaga atau komunitas penggerak literasi yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasanya  Satuan: Lembaga Tipe Penghitungan: Kumulatif	Laporan internal	Koordinator KKLP Pembinaan dan Bahasa Hukum

mampu menangkal hoaks dan bijak dalam memanfaatkan medsos), dan adanya program kegiatan literasi yang kreatif dan inovatif di komunitas literasi.

<b>SK : Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA</b>			
<b>IKK : Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)</b>			
<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Jumlah pemelajar Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) baik secara formal, nonformal, dan informal di dalam dan di luar negeri. Kegiatan yang dilakukan adalah memfasilitasi pengajaran program BIPA, APPBIPA, atau komunitas pengajar mandiri BIPA.	Menjumlahkan seluruh pemelajar BIPA yang terlayani oleh lembaga yang mengadakan program BIPA, baik secara langsung maupun tidak langsung  Satuan: Orang Tipe Penghitungan: Kumulatif	Laporan internal	Koordinator KKLP BIPA

<b>SK : Tersedianya produk diplomasi bahasa</b>			
<b>IKK : Jumlah produk penerjemahan</b>			
<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Jumlah produk penerjemahan dalam hal ini adalah buku atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan dari bahasa sumber ke bahasa sasaran. Produk penerjemahan mendukung interaksi ilmiah dan kultural antarkomunitas dalam lingkup nasional dan internasional. Produk penerjemahan dihasilkan dari kegiatan penerjemahan buku ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan sebaliknya, serta dari bahasa	Menjumlahkan seluruh produk penerjemahan yang dihasilkan  Satuan: Produk Tipe Penghitungan: Kumulatif	Laporan internal	Koordinator KKLP Penerjemahan

daerah ke bahasa Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan dokumen Negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, dan penerjemahan buku.

<b>SK : Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah</b>			
<b>IKK : Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra daerah</b>			
<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Jumlah partisipan masyarakat dalam perlindungan bahasa dan sastra daerah diperoleh dari kegiatan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah. Partisipan perlindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat penutur jati. Konservasi dalam konteks perlindungan bahasa merupakan upaya untuk mempertahankan dan mengembangkan bahasa agar tetap dipergunakan oleh masyarakat penuturnya. Konservasi sastra merupakan kegiatan perlindungan yang keluarannya adalah dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. Revitalisasi bahasa merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.	Menjumlahkan seluruh anggota masyarakat yang terlibat dalam kegiatan perlindungan bahasa dan sastra, yaitu konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra. Penghitungan dilakukan dengan rumus A = B + C Keterangan: A = Jumlah partisipan perlindungan bahasa dan sastra B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa C = Jumlah partisipan perlindungan sastra B=M+N Keterangan: B = Jumlah partisipan perlindungan bahasa M = Jumlah penutur bahasa yang	Laporan internal	Koordinator KKLP Pelindungan dan Pemodernan

revitalisasi sastra merupakan upaya peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran kepada penutur muda.

terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi

$N = \text{Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi bahasa}$

$C = X + Y$

Keterangan:  
 $C = \text{Jumlah partisipan perlindungan sastra}$   
 $X = \text{Jumlah pelaku atau pemilik sastra yang terlibat sebagai informan/narasumber dalam kegiatan konservasi}$   
 $Y = \text{Jumlah pengajar/pembelajar dalam kegiatan revitalisasi sastra}$

Satuan: Orang  
Tipe Penghitungan: Kumulatif

<b>SK : Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan</b>			
<b>IKK : Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan</b>			
<b>Definisi</b>	<b>Metode Penghitungan</b>	<b>Sumber Data</b>	<b>Penanggung Jawab</b>
Akuntabilitas kinerja merupakan program yang wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas berdasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja,	Nilai SAKIP diperoleh dengan menjumlahkan Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Kinerja. Penghitungan dapat dilakukan dengan rumus  Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + [Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan Kinerja] + [Evaluasi	Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal	Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan

pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Kinerja]

Evaluasi SAKIP pada seluruh instansi pemerintah dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Satuan: Predikat  
Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

**SK : Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan**

**IKK : Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan**

Definisi	Metode Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
<p>Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L dihasilkan dari evaluasi Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, aspek implementasi dan aspek manfaat.</p> <p>Penilaian Kinerja dilakukan atas 2 indikator</p> <p>1. Indikator Kinerja atas Pelaksanaan Anggaran (IKPA)</p> <p>2. Indikator Kinerja atas hasil</p>	<p>Penghitungan Nilai Kinerja Anggaran dihasilkan dari jumlah Nilai IKPA dan Nilai EKA. Penghitungannya dapat dilakukan sebagai berikut</p> <p>Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%]</p> <p>Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:</p> <p>Nilai Kinerja</p> <p>&gt;90% Sangat Baik &gt;80%-90% Baik &gt;60%-80% Cukup</p>	<p>1. Aplikasi SMART DJA (EKA)</p> <p>2. Aplikasi OM SPAN (IKPA)</p>	<p>Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan</p>

pelaksanaan anggaran (EKA) >50%-60% Kurang  
IKPA Berkontribusi 40% <%50 Sangat Kurang  
dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja Anggaran dikelompokkan ke dalam kategori sebagai berikut:

Satuan: Nilai  
Tipe Penghitungan: Non Kumulatif

Nilai Kinerja  
>90% Sangat Baik  
>80%-90% Baik  
>60%-80% Cukup  
>50%-60% Kurang  
<%50 Sangat Kurang

Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan.

**Cascading (Renstra dan PK)  
BALAI BAHASA PROVINSI SULAWESI SELATAN  
TAHUN 2023**

SS	IKSS	SP	IKP	SK	IKK	KRO	RO	KOMPONEN	PENGAMPU					
Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan	3.1 Indeks Kemahiran Berbahasa Indonesia	Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1 Persentase penutur bahasa Indonesia terbina yang meningkat kualitas berbahasanya	Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra	3.1.1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra	2021.QMA	2021.QMA.001	Produk kodifikasi bahasa	2021.QMA.001 '052 Pemerikayaan Kosakata '2021.QMA.001 053 Pengembangan Kamus	Pusbanglin dan UPT				
								2021.QMA.002	Produk pengembangan sastra		Pusbanglin			
				Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan	3.1.1.2 Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi masyarakat	2022.DDA	2022.DDA.003	Produk pengayaan pendukung literasi		Pusbin				
					3.1.1.3 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan	2022.QDC	2022.QDC.002	Penutur bahasa terbina	2022.QDC.001 Peningkatan Kemahiran Berbahasa 2022.QDC.001 055 Peningkatan Apresiasi Sastra	Pusbin dan UPT				
							2022.QDC.002	Penutur bahasa teruji	2022.QDC.002 052 Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka	Pusbin dan UPT				
							2022.QDC.003	Generasi muda terbina program literasi	2022.QDC.003 051 Pemilihan Duta Bahasa penggerak literasi 2022.QDC.003 052 Pembinaan literasi generasi muda	Pusbin dan UPT*				
					3.1.2.1 Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya	2022.BDB	2022.BDB.001	Lembaga terfasilitasi layanan profesional kebahasaan	2022 '051 Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum 2022 053 Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik	Pusbin dan UPT				
					3.1.2.2 Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina	2022.BDB	2022.BDB.002	Komunitas penggerak literasi terbina	'2022 '051 Pemutakhiran profil komunitas penggerak literasi 2022 052 Pemberdayaan komunitas penggerak literasi	Pusbin dan UPT				
					3.1.3.1 Jumlah negara yang mengajarkan bahasa Indonesia	6702.QDB	6702.QDB.001	Lembaga Terfasilitasi Program BIPA	6702.QDB.001'054 Pelayanan profesional terhadap lembaga penyelenggara program BIPA	Pustaka dan UPT				
					3.1.3.2 Tersedianya produk diplomasi bahasa	6702.BMA	6702.BMA.002	Produk Penerjemahan	6702.BMA.001.052 Pelaksanaan Penerjemahan	Pustaka dan UPT				
				3.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan	Meningkatnya kelestarian bahasa daerah	3.2.8 Indeks pemanfaatan bahasa daerah oleh penuturnya	Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra	Tersedianya produk diplomasi bahasa	3.1.3.2 Jumlah produk penerjemahan	6702.DDC	2021.DDC.001	Model pelindungan bahasa		Pusbanglin
									3.2.8.1 Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra daerah	2021.DDC	2021.DDC.002	Model Pelindungan Sastra		Pusbanglin
									3.2.8.2 Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah	2021.QDC	2021.QDC.001	Partisipan pelindungan bahasa	2021.QDC. Fasilitas dan Pembinaan Masyarakat	UPT
										2021.QDC	2021.QDC.002	Partisipan pelindungan sastra	'2021.QDC.002'051 Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model pelindungan sastra daerah '2021.QDC.002 052 Pemberdayaan pelaku sastra dalam mengimplementasikan model pelindungan sastra daerah	UPT
Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel	5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek	Meningkatnya akuntabilitas layanan dan pengelolaan anggaran pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi	5.3.11 Predikat SAKIP Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa	Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	5.3.11.1 Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	2020.EBA	2020.EBA.962	Layanan Umum	2020.EBA. 962 '051 Pelayanan Kerumahtanggan dan Perlengkapan '2020.EBA. 962 '053 Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal '2020.EBA. 962.056 Layanan SDM '2020.EBA. 962.058 Layanan Kehumasan dan Publikasi '2020.EBA. 962.059 Layanan Monitoring dan Evaluasi internal	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT				
				Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan	2020.EBA	2020.EBA.994	Layanan Perkantoran	2020.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan '2020.EBA.994.002 Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT				
						2020.EBB	2020.EBB.951	Layanan Sarana Internal		Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT*				
						2020.EBB.971	Layanan Prasarana Internal	2020.EBB.971.998 Rehab/Renovasi Gedung Bangunan	Setban, Pusbang, Pusbin, Pustanda, UPT*					

Mengetahui,  
Kepala Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan  
  
Dr. Ganjar Harimansyah  
NIP. 197505222001121003

